

2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2023**

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

**Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telp. (0291) 431328 Fax. (0291) 434353**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKjP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Manfaat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan memberikan umpan balik untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja BPPKAD. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta yang telah ditetapkan.

Kudus, 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS,



DJATI SOLECHAH, S.Sos, MM. 
Pembina Utama Muda
NIP. 19680703 198803 2 009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Akuntabilitas kinerja BPPKAD bertujuan untuk menyampaikan informasi perkembangan atas target dan realisasi berdasarkan capaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, RKPD Tahun Anggaran 2023 dan DPA BPPKAD Tahun Anggaran 2023. LKjIP juga memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan BPPKAD.

Dengan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Diketuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Diketuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.

B. Struktur Organisasi

1.1 Tugas dan Fungsi BPPKAD

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Bab II Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus. Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Subbid. Perencanaan dan Penetapan;
 2. Sub. Koordinator Pendataan dan Pendaftaran; dan
 3. Subbid. Penagihan dan Keberatan.den
- d. Bidang Anggaran membawahkan :
 1. Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan
 2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
 1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
 2. Subbid. Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
 1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
 2. Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- g. Bidang Pengelolaan Aset daerah
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan

- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. **Bidang Pendapatan** merupakan unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, pendataan, pendaftaran penagihan dan keberatan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan menyelenggarakan

- 1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah;
 - 2) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah.
8. **UPTD Pengelola Pajak Daerah** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pajak daerah. UPTD Pengelola Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas:
- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD;
 - b. Menyiapkan konsep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD;
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
 - d. Meneiaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - e. Melaksanakan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - g. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pengelolaan pajak daerah serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan,

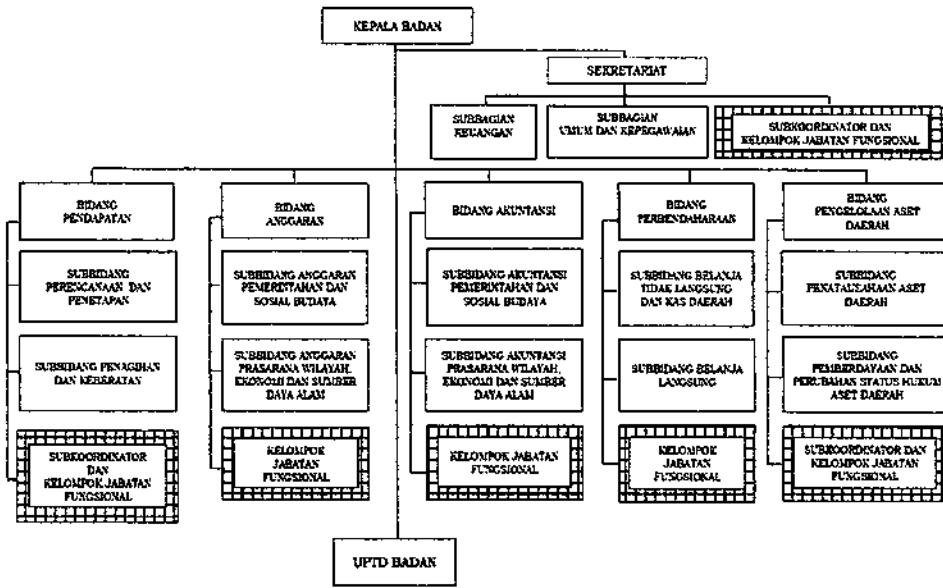
keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;

- j. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan pajak daerah;
- k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus



Sumber : Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dimaksudkan agar pelayanan perangkat daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pengguna layanan. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi diperoleh gambaran pelayanan perangkat daerah.

Isu- isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Masih rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah
2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Adapun permasalahan utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah
2. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses penganggaran daerah
3. Belum tertibnya pengajuan SPM sesuai ketentuan
4. Ketepatan waktu penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah

5. Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

Dilihat dari isu strategis BPPKAD masih rendahnya kapasitas fiskal daerah menunjukkan bahwa belum kuatnya kemandirian keuangan daerah karena masih tingginya ketergantungan pemerintah kabupaten kudos pada pendapatan transfer sebesar 77,88%, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 22,07%.Selanjutnya isu strategis belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan proses pengelolaan keuangan daerah mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban belum terlaksana dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD membantu tugas Bupati melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, BPPKAD melaksanakan fungsi koordinasi, kerjasama, bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi internal yaitu semua Perangkat Daerah, dengan instansi eksternal yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, BPK, BPKP, BPN dan stakeholder yang lain wajib pajak/wajib retribusi, Perbankan, Notaris/PPAT dan Perguruan Tinggi.

Pohon kinerja (cascading) yang merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang terperinci dengan menggunakan kerangka logis, sedangkan perencanaan yang terintegrasi/ program kolaborasi atau disebut crosscutting program yaitu merencanakan penganggaran yang terintegrasi. Berdasarkan isu strategis dan permasalahan utama BPPKAD, sinergitas dan kolaborasi yang dilakukan digambarkan dengan diagram sebagai berikut :



BKPSDM : Kompetensi SDM perlu ditingkatkan

1. Masih rendahnya Kapasitas Fiskal
2. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

OPD : Berpedoman pada Regulasi
 BPKP : Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) terus diupdate/diperbarui.



Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan disisi pengaturan klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang semula terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Beberapa regulasi yang mendasari kinerja BPPKAD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD dalam rapat kerja pansus.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah, menyusun anggaran daerah, menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah serta mengelola pendapatan daerah dan keuangan daerah. Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan meliputi Perangkat Daerah, wajib pajak dan wajib retribusi dari kalangan masyarakat serta dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman Standar Pelayanan. Dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Secara garis besar pelayanan BPPKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pendataan obyek dan subyek pajak/ retribusi yang baru.
4. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendistribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak.
6. Pembinaan kepada wajib pajak yang melanggar Perda bekerjasama dengan Satpol PP.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah.
8. Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD

9. Merekap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA PPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Perubahan APBD.
10. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) APBD maupun Perubahan APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.
11. Penyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
12. Penyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembahasan TAPD untuk dikirim ke DPRD sebagai bahan pembahasan.
13. Penyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat Paripurna DPRD.
14. Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD.
15. Melaksanakan urusan di bidang Perbendaharaan dan Otorisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran. Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan
17. Melaksanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
18. Membuat register SP2D dan penjagaan realisasi SP2D.
19. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.
20. Menerbitkan SP2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah.
21. Meneliti dan mengolah mutasi perubahan gaji PNS, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel gaji, gaji terusan dan uang duka/wafat.
22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaa (JUKLAK) APBD, Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.
23. Pembinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrasi kepada SKPD
24. Memfasilitasi dan merealisasikan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Gubernur
25. Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
26. Melaksanakan urusan di bidang akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

(SIMDA) kepada SKPD

28. Fasilitas membuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD
29. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD
30. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan
31. Penyusunan Laporan Triwulanan Realisasi APBD
32. Penyusunan Laporan Semesteran Realisasi APBD
33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBD.
34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
35. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
36. Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

Dalam memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah, BPPKAD melaksanakan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *SIMDA Keuangan*, *SIMDA Pendapatan*, *SIMDA Aset*, selain itu tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, BPPKAD melaksanakan pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat diantaranya : *Pajak Bumi dan Bangunan (e_PBB)* ada 2 aplikasi yaitu *Sim PBB* dan *Sismiop*, *pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (e_BPHTB)*, *Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e_SPTPD)* *Sistem Informasi Geografis (SIG)* dan *Sistem Aplikasi Tanah (Siaplita)*, *Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)*, *Sim Aset*. *Sim BMD* , *e-Tracking*. *Sim RKBMD* dan *SISWAIPDA (Sistem Informasi Status Wajib Pajak Daerah)*. Semua sistem pelayanan berbasis elektronik diharapkan memudahkan OPD dan masyarakat mengakses dengan cepat dan tepat

D. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2023;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
6. Rencana Strategis (Renstra) Nomor 050.1337.2/25.01/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

E. SISTEMATIKA

Penulisan LKjIP Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

- A. Struktur Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strsategis
- B. Rencana Kinerja
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - Target dan realisasi kinerja Tahun 2023
 - Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir
 - Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPPKAD
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- RKT Tahun 2023
- Rencana Aksi Tahun 2023

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera.

Misi 2, Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

2. Tujuan dan Sasaran

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Relegius, Cerdas dan Sejahtera								
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	18,18%	16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%
		Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	1,91%	4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90%	92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75	75	80,1	80,2	80,3	80,4

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023 yang meropidan acuan dalam penyusunan Renstra

Perangkat Daerah (PD) dalam Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan OPD

Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah - Meningkatnya PAD - Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pendapatan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi guna mendukung kondusivitas pelaksanaan berusaha - Memantapkan dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. - Menyusun kajian potensi secara bertahap atas masing-masing jenis pendapatan - Melakukan pendataan dan penyesuaian nilai obyek pajak berdasarkan kewajaran harga sesuai ketentuan yang berlaku. - Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan - Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan guna optimalisasi pendapatan daerah. 2. Kebijakan Belanja Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat dan prioritas. - Diprioritaskan membiayai program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah dan Indikator Kinerja Pemda dan IKU OPD. - Belanja daerah diarahkan pada upaya pemulihan dampak pasca covid-19 yaitu pemulihan industri, pariwisata dan investasi melalui program peningkatan dan pengembangan perindustrian, pariwisata dan penanaman modal. - Reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana. 3. Kebijakan Pembiayaan <p>Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan pemanfaatan SiLPA. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ada kecenderungan terjadi defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.</p> 4. Kebijakan Umum Akuntansi <ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel - Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan - Mewujudkan keseragaman pengakuan pengukuran - maupun pelaporan dari semua transaksi yang terjadi pada entitas pelaporan SKPD/PPKD - Menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah kabupaten relevan dan andal dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan dengan meminimalkan terjadinya bias terhadap pengungkapan komponen laporan keuangan

		<p>5. Kebijakan pengelolaan aset daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan - Mendayagunakan aset-aset daerah dan yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ke tiga - Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dari perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan
--	--	--

Tabel 2.3 IKU BPPKAD Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
- Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		- Rasio Kemandirian Keuangan daerah	%	17,04%
		- Kualitas LKPD	%	100%
	- Meningkatnya PAD	- Peningkatan PAD per tahun	%	3,29%
	- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		94,00%
	- Nilai Evaluasi SAKIP	- Nilai Evaluasi SAKIP	Skore	80,4

B. Perjanjian Kinerja

Adalah tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun Tujuan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur;
2. Wujud nyata komitmen;
3. Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi; dan
6. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 telah melakukan perjanjian Kinerja dengan Bupati sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA BPPKAD TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,44%
		Kualitas LKPD	100%
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,29%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	94,00%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,4

No	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah	85 Indeks
2	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen
3	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dok
4	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	14 Dok
5	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	98 Orang
6	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	24 paket
7	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	83 paket
8	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	33 paket
9	Jumlah paket bahan logistik kantor	14 paket
10	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	17 paket
11	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dok
12	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan
13	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit
14	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 laporan
15	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan
16	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
17	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	130 unit
18	Jumlah mebel yang dipelihara	11 unit
19	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit
20	Jumlah sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	27 unit
21	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
22	Jumlah dokumen anggaran daerah	8 Dok

23	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
24	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	7 Dok
25	Capaian realisasi pembayaran belanja Perangkat Daerah	95%
26	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja perangkat daerah	12 Dok
27	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, dana darurat dan dana bagi hasil Kabupaten	1 Tahun
28	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%
29	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dok
30	Persentase realisasi PAD	100%
31	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	59 Dok

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD	100%	1.887.666.495
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	961.392.340
		Capaian realisasi pembayaran belanja Perangkat Daerah	95%	315.023.850
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	591.106.500
		Belanja Transfer		281.982.414.623
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemda	90%	6.768.711.714
4	Penunjang Urusan Pemda	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja BPPKAD	85	20.875.496.850

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun skala nilai pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Skala pengukuran capaian kinerja	Kategori
1	≥90,1%	Sangat tinggi
2	75% - 90%	Tinggi
3	65% - 75%	Sedang
4	50,1% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan. Secara umum Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Keselarasan Renstra BPPKAD dengan RPJMD terkait dengan Misi ke 2 adalah mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik, yang sasarannya adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra BPPKAD Tahun 2018-2023, ada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis BPPKAD meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, semula indikatornya Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) yang diampu oleh bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan bidang aset dengan program pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan, serta mempedomani Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bidang aset mempunyai program sendiri yaitu program pengelolaan barang milik daerah. Perubahan nomenklatur tersebut, diikuti dengan perubahan indikator bidang aset yaitu persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Selain itu adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) maka indikator IPKAD disesuaikan menjadi IPKD. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dapat diukur dengan indikator Kinerja Utama menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator	Formula Penghitungan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	PAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dikali 100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	PAD Tahun ini dikurangi PAD Tahun lalu dibagi PAD Tahun lalu dikali 100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Penilaian Mandiri)	Jumlah target program dibagi jumlah program dikali 100%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kemendagri	Ada 6 (enam) Dimensi Penilaian : 1.Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2.Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4.Penyerapan anggaran 5.Kondisi keuangan daerah 6.Opini BPK atas LKPD
		Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	Koreksi audit BPK dibagi total aset Pemda dikali 100%.
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Hasil evaluasi dari Inspektorat

1. Target dan realisasi pengukuran capaian kinerja tahun ini sebagaimana tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Kategori
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,04%	22,22%	130,39%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,29%	19,91%	605,16%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (penilaian mandiri)	93,70%	96,52%	103,00%	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kemendagri	59,10	79,16	156%	Sangat Tinggi
		Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	99,99%	111,10%	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,4 Nilai	63,60	79,10%	Rendah

Berdasarkan hasil tabel 3.3 pencapaian indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2023, disimpulkan bahwa dari 4 indikator kinerja, 3 indikator tercapai, dengan kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator nilai SAKIP masuk kategori rendah. Realisasi nilai SAKIP menurun signifikan, karena pada penetapan di target Renstra BPPKAD Tahun 2018-2023 target nilai SAKIP sangat tinggi dan tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat ada perubahan bobot/skor berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 untuk komponen pengukuran kinerja bobotnya 25, sedangkan di Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 untuk komponen pengukuran kinerja bobotnya 30.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 BPPKAD melaksanakan Misi 2 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang semakin handai untuk peningkatan pelayanan publik dengan menetapkan 4 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,04%	22,22%	130,39%	124,08%	130,39%

1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan internal dibandingkan dengan sumber pendanaan eksternal (pendapatan transfer). Hal ini juga menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi total pendapatan daerah mencapai Rp. 2.276.162.193.662 atau sebesar 101,01% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.236.981.707.370 Pendapatan tersebut paling besar bersumber dari Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.772.613.403.515. Target PAD Tahun 2023 sebesar Rp.473.691.698.000,00 terealisasi sebesar Rp. 502.312.790.147 terdiri

dari pajak daerah sebesar Rp. 183.825.346.945, retribusi daerah sebesar Rp. 28.729.697.717 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.971.341.235 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 279.786.404.250.

Jika dilihat dari tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2019-2023, kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer (1,72%). Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang belum kuat dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Berikut tabel rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023.

Tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023.

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RERATA PERTUM BUHAN
PENDAPATAN	2.090.430.364.413	2.016.176.986.239	2.163.634.437.714	2.078.759.801.863	2.259.669.756.521	2,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	343.824.122.868	383.892.971.981	507.167.074.775	418.705.145.589	502.073.304.406	5,26
Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.671.284.941	183.825.346.945	2,72
Pendapatan Retribusi Daerah	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.612.925.153	28.729.697.717	4,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	9.971.341.235	(1,50)
Lain-lain PAD yang Sah	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	215.732.399.910	279.546.918.509	7,72
PENDAPATAN TRANSFER	1.676.579.317.018	1.562.392.880.256	1.585.706.602.550	1.658.338.656.274	1.756.360.452.115	1,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.491.203.619.424	1.420.715.034.772	1.415.040.083.126	1.477.044.543.502	1.568.454.660.084	1,81
Dana Perimbangan	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.236	1.314.958.509.502	1.418.441.426.084	2,30
Dana Bagi Hasil (DBH)	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	279.196.280.839	344.830.065.339	6,19
Dana Alokasi Umum (DAU)	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	741.118.818.488	773.322.648.815	1,30
Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	294.643.410.175	300.288.711.730	1,24
Dana Insentif Daerah	56.420.303.000	89.301.426.000	24.112.366.000	15.963.044.0000	13.267.148.000	(4,71)
Dana Desa	136.723.311.800	147.823.461.000	151.037.149.800	146.122.990.000	136.746.086.000	(1,53)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.375.697.594	141.677.845.484	170.666.519.424	181.294.112.772	187.905.792.031	0,94
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	171.893.652.772	175.731.971.031	0,70
Bantuan Keuangan	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	5.504.891.200	12.173.821.000	7,33
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.026.924.527	69.891.134.022	70.760.760.389	1.716.000.000	1.236.000.000	(7,96)
Pendapatan Hibah	70.026.924.527	69.891.134.022	70.760.760.389	1.716.000.000	1.236.000.000	(7,96)

Sumber : BPPKAD 2023.

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,29%	19,91%	605,16%	-21,14%	605,16%

2.1. Persentase Peningkatan PAD per Tahun

Target PAD tahun 2023 sebesar Rp. 473.691.698.000,00 terealisasi sebesar Rp.502.312.790.147 (105,99%) terdiri dari pajak daerah sebesar Rp.183.825.346.945, retribusi daerah sebesar Rp. 28.729.697.717, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.971.341.235 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 279.786.404.250, jika dibandingkan realisasi PAD tahun 2022 Rp. 418.705.145.589 melampaui target sebesar Rp.83.607.644.558 (103,99%) dari target sebesar Rp. 473.691.698.000.Meningkatnya PAD disumbang hampir semua jenis pendapatan kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan 9,63%, Retribusi Daerah 16,73%, dan Lain-LainPAD Yang Sah 29,69%.

Kenaikan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah antara lain disumbang pertumbuhan ekonomi lokal, intensifikasi pemungutan, dan penghapusan rujukan berjenjang pada RSUD. Sedangkan penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan bagi hasil *Asset Management Unit (AMU)* yang dikelola oleh Bank Jateng Tahun 2022 mengalami penurunan dan berpotensi mengurangi nilai pendapatan sektor ini.

Dalam upaya optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Kudus menggunakan bauran kebijakan sesuai dengan karakteristik masing-masing akun pendapatan. Akun pendapatan pajak daerah dioptimalkan dengan menggunakan metode intensifikasi (melalui peningkatan NJOP PBB-P2 secara selektif pada wilayah yang mengalami pertumbuhan tinggi dan penggunaan alat pemantau transaksi pajak secara elektronik) maupun metode ekstensifikasi (pendataan untuk obyek pajak daerah yang selama ini belum dikerjakan).

Pada akun retribusi daerah, beberapa Langkah dilakukan guna mendukung optimalisasi retribusi daerah, khususnya melalui aktivitas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembangunan aplikasi SIMRETDA dalam rangka integrasi pemungutan retribusi daerah. Selain perluasan digitalisasi dilakukan dengan aplikasi e-retribusi yang selama ini hanya

digunakan di Pasar Kliwon, sekarang digunakan untuk beberapa pasar lain yang dikelola Dinas Perdagangan. Jika dilihat dari tabel rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2019-2023, realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar 5,26% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai sebesar 507 miliar. Jika dilihat berdasarkan komponen, sebagian besar kontribusi PAD berasal dari lain-lain PAD yang Sah 7,72%. dan pajak daerah 5,26%.

Berikut Tabel rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2019-2023

Tabel rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RERATA PERTUM BUHAN
PENDAPATAN	2.090.430.384.413	2.016.176.986.239	2.163.634.437.714	2.078.759.801.863	2.276.162.193.662	2,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	343.824.122.868	383.892.971.961	507.167.074.775	418.705.145.589	502.312.790.147	5,26
Pendapatan Pajak Daerah	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.671.284.941	183.825.346.945	2,72
Pendapatan Retribusi Daerah	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.612.925.153	28.729.697.717	4,46
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	9.971.341.235	(1,50)
Lain-lain PAD yang Sah	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	213.732.399.910	279.786.404.250	7,72

Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 30 Desember 2023 (diolah)

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas LKPD	95%	97,52%	100%	100%	100%
	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (penilaian mandiri)	93,70%	96,52%	162,48%	103%	162,48%
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah/IPKD (Kemendagri)	59,10	79,16			
	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemda	90%	99,99%	111,10%	105,2%	111,10%

3.2 Berdasarkan sasaran strategis ketiga, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPPKAD melaksanakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu

3.2.1. Opini BPK atas LKPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan BPPKAD telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 antara lain memuat :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Dengan demikian capaian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah memenuhi SAP (100%). Penilaian BPK mendasarkan pada kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 kriteria :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Kecukupan Pengungkapan
- Kepatuhan terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

(WTP) dari BPK. Perolehan WTP 11 kali disertai catatan, saran dan rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan entitas.

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 mendapat Predikat WTP, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kudus telah disusun dan telah diperiksa oleh BPK wajar menyajikan hal material, posisi keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

3.2.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Berdasarkan Renstra BPPKAD Tahun 2018-2023 pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih menggunakan formulasi penghitungan penilaian mandiri setiap tahunnya, dengan formulasi penghitungan didasarkan pada angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja adalah jumlah realisasi target program dibagi jumlah program dikali 100% diperoleh angka rata-rata. Karena pada saat penyusunan Renstra 2018-2023 belum ada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain capaian IPKD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2022 naik cukup signifikan. Adapun secara rinci capaian per dimensi IPKD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Dimensi	2018	2019	2020	2021	2022
1	5,490	9,273	7,337	3,114	11,939
2	17,2414	13,6207	11,897	13,4483	20
3	12,6724	13,4483	12,414	12,4138	13,966
4	15	10	10	10	15
5	1,308	0,663	3,809	5,133	3,258
6	15	15	15	15	15
Nilai IPKD	66,71	62,00	60,45	59,10	79,16

Keterangan :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transaparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK atas LKPD

Nilai IPKD Kabupaten Kudus Tahun 2022 naik cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 karena pada nilai dimensi 1 : dokumen RPJMD 2018-2023 sudah menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019 dan pagu RKPD, KUA PPAS sesuai dengan pagu APBD, dimensi 2: alokasi belanja infrastruktur sudah terealisasi 27,50%, dimensi 3 : dokumen APBD Tahun 2022 dan 2023 diupload tepat waktu, dimensi 4 : realisasi penyerapan anggaran belanja modal sudah mencapai 83,16%, dimensi 5 : fleksibilitas dan solvabilitas Kabupaten Kudus masih rendah, karena masih mengandalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer, dimensi 6 : mendapatkan skor maksimal karena 3 tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2.3. Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemda

Salah satu faktor penentu dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tertibnya pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah mencakup atas pengelolaan seluruh aset yang dimiliki pemerintah daerah ataupun aset yang dikelola oleh perangkat daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah adalah kurang tertibnya pengelolaan administrasi aset yang dilakukan oleh perangkat daerah. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum, untuk dapat memfasilitasi perangkat daerah agar mampu menyediakan laporan rekonsiliasi aset tepat waktu, sehingga laporan keuangan secara umum tidak mengalami kendala.

Disisi lain, dalam hal pengamanan aset daerah, masih terdapat 597 aset daerah berupa pekarangan, 276 jalan kabupaten, 68 jalan irigasi dan 229 saluran irigasi yang belum bersertifikat, sehingga perlu dilakukan Upaya yang lebih nyata untuk melakukan pengamanan aset secara bertahap. Sedangkan untuk aset yang dikelola pemerintah daerah yang masih terdapat tumpang tindih kepemilikan masih ada 5 aset yang perlu diselesaikan. Dari gambaran permasalahan pengelolaan aset diatas, capaian indikator persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah tahun 2023 meningkat sebesar 99,99% dari target sebesar 90%, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,94%. Karena terdapat peningkatan tertib pengelolaan barang milik daerah, sehingga dalam pemeriksaan BPK Tahun 2022 tidak terdapat koreksi audit yang signifikan, nilai aset tetap sebelum audited BPK adalah Rp. 6.068.656.733.376,- dalam pemeriksaan BPK terdapat koreksi Nilai Aset Tetap Rp. 3.676.718.727 sehingga Nilai Aset Tetap setelah di audit BPK adalah Rp.6.064.980.014,- (0,01%)

4. Nilai Evaluasi SAKIP BPPKAD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Evaluasi SAKIP	80,40	63,66	79,10%	96,89%	79,10%

Dari indikator nilai evaluasi SAKIP BPPKAD masih menggunakan realisasi tahun 2022 dengan nilai 63,66 menurun dibandingkan nilai SAKIP tahun 2021, karena ada perubahan Permenpan pada skor/bobot penilaian pada indikator akuntabilitas kinerja. Tahun 2023, masih menggunakan nilai SAKIP tahun 2022 karena belum dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.

Pencapaian kinerja dari keempat sasaran strategis tersebut di atas, tidak terlepas dari capaian pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	85 Indeks	90,46	105,86%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD yang tersusun	15 Dok	15 Dok	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar	9 Dok	9Dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan kinerja PD yang tersusun sesuai standar	6 Dok	6 Dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai standar	5 Dok	5 Dok	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	75 ASN	69 ASN	92%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dok	1 Dok	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	8 Dok	8 Dok	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	1 Dok	1 Dok	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Diklat	98 orang	98Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24 Paket	24 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	83 Paket	83 Paket	100%

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	33 Paket	33 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	14 Paket	14 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	17 Paket	14 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	10 Unit	10 Unit	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	12 Lap	12 Lap	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Lap	2 Lap	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik	2 Lap	2 Lap	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Lap	12 lap	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	184 Unit	172 Unit	93,48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	130 Unit	128 Unit	98,46%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	11 Unit	7 Unit	63,64%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	27 Unit	27 Unit	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95%	88,38%	93,03%
		Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Penyelesaian tahapan/proses pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	99,73%	99,73%
		Penyelesaian tahapan/proses penganggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok	8 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dok	2 Dok	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan Perda dan Perbup APBD	2 Dok	2 Dok	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	4 Dok	4 Dok	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	80 Laporan	79 Laporan	98,75%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6954 Laporan	6740 laporan	96,92%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dok	10 Dok	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Lap	18 Lap	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi.	1 Lap	1 Lap	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	100%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	-	50%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perbup Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	-	50%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	36 Dok	36 Dok	100%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Lap	12 Lap	100%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 Lap	12 Lap	100%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten	12 Lap	12 lap	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90 persen	99,99 persen	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	12 Dok	12 Dok	100%

	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dok	2 Dok	100%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan BMD	1 Dok	1 Dok	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pentausahaan BMD	6 Lap	6 Lap	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan BMD	900 Sertifikat	900 Sertifikat	100%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	1 Lap	1 Lap	100%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11 Dok	11 Dok	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD	100 persen	101,01 persen	101,01%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	jumlah realisasi PAD	473 Miliar	502 Miliar	105,99
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa dan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 Lap	1 Lap	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	1 Unit	100%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak daerah dan wajib pajak daerah	15000 OP/WP	14097 OP/WP	93,98%
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 Lap	1 lap	100%
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya.	16 Obyek Pajak	16 OP	100%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	399000 Dok	399000 Dok	100,56%
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	22500 layanan	27459 layanan	100%
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 Dok	1 Dok	100%
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Dokumen	115 Dokumen	100%
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1 Dok	1 Dok	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	1 Lap	1 lap	100%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	1 lap	100%

2. Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja 3 tahun terakhir

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,83%	31,04%	184,43%	16,94%	21,02%	124,08%	17,04%	22,22%	130,39%
		Kualitas LKPD	100	100	100 %	100 memadai	100 memadai	100%			
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,25%	32,18%	990,15%	3,25%	-17,89%	-21,14%	3,29%	19,91%	605,16%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
		Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (penilaian mandiri)	93,60	95,58	102,11	93,70%	96,52%	103,00%	94%	97,52%	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kemendagri	-	59,10		59,10	79,16	156%	59,10 Indeks		
		Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah				90%	99,94%	111,04%	90%	99,99%	111,10%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,2	77,89	97,12	80,3 nilai	77,89	96,89%	80,40 nilai	63,60 nilai	79,10%

3. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target rencana strategis

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian	Kategori	Prosentase Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)	Target Nasional (2023)	Capaian s.d.2023 terhadap Target Nasional (%)
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,04%	22,22%	130,39%	Sangat Tinggi	124,08%	130,39%	-	-
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,29%	19,91%	605,16%	Sangat Tinggi	-21,14%	605,16%	-	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	-	-
		Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (penilaian mandiri)	93,70%	96,52%	103,00%	Sangat Tinggi	103,00%	162,48%	-	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kemendagri	59,10	79,16	156%	Sangat Tinggi	103,00%	162,48%		
		Persentase Jumlah koreksi audit BPK terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	99,99%	111,10%	Sangat Tinggi	105,2%	111,10%		
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,4 Nilai	63,60	79,10%	Rendah	96,89%	79,10%	-	-

Menindaklanjuti keterkaitan realisasi capaian kinerja nasional, BPPKAD melaksanakan kebijakan dari Kementerian Keuangan yaitu kebijakan fiskal yang diarahkan untuk optimalisasi penerimaan negara, penerimaan pajak, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksana anggaran serta kualitas pengelola kekayaan negara. Kebijakan tersebut, ada di program dan kegiatan BPPKAD.

Selanjutnya keterkaitan dengan realisasi capaian kinerja BKAD Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan IKU :

1. Persentase laporan keuangan daerah berbasis akrual dengan target 100%
2. Persentase aset daerah yang yang dikelola dengan baik dengan target 100%.

Untuk pendapatan daerah diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tersendiri, tidak termasuk tugas pokok dan fungsi BKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai perbandingan kinerja yang setara dengan kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus adalah BPKAD Kabupaten Pati, dilihat dari IKU dan PAD

No	IKU BPPKAD Kab. Kudus	IKU BPKAD Kab. Pati
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2	Meningkatnya PAD	Meningkatnya PAD
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	

Sebagai perbandingan kinerja indikator meningkatnya PAD, BPPKAD Kabupaten Kudus dan BPPKAD Kabupaten Pati sebagai berikut:

PAD Kabupaten Kudus		PAD Kabupaten Pati	
2017	366.031.203.000	2017	428.374.751.000
2018	337.364.609.000	2018	384.041.850.000
2019	343.824.122.000	2019	363.824.130.000
2020	383.884.186.000	2020	371.741.589.000
2021	507.428.207.000	2021	388.644.537.000
2022	416.454.707.766	2022	362.814.604.000
2023	502.073.304.406	2023	440.327.704.789

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Jumlah total pegawai BPPKAD per 15 Januari 2023 sebanyak 84 orang terdiri dari 67 orang PNS, 1 orang PHD dan 16 orang tenaga kontrak.

Tabel 4.1

Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	32	35

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki walaupun selisih hanya 3 orang.

Tabel. 4.2

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	9
2.	Sarjana	35
3.	D3	7
4.	SMU	16
5.	SMP	-
6.	SD	1
		67

Berdasarkan Tabel diatas. diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 16 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 7 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 53 Orang dan Paskasarjana (S2) sebanyak 9 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 35 Orang.

Tabel 4.3

Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

GOLONGAN																Jumlah
IV				III				II				I				
a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
7	1	1	-	4	12	7	26	1	1	1	6	-	-	-	-	67

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat secara komposisi per golongan sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 49 orang, kedua adalah golongan IV dan Golongan II masing-masing sebanyak 9 orang, sedangkan gol I tidak ada.

Tabel 4.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	9
2.	Sarjana	35
3.	D4	0
4.	D3	7
5.	SMA (SLTA)	16
6.	SMP (SLTP)	0
7.	SD	1
	Jumlah	67

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana 9 orang dan sarjana berjumlah 49 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 67 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak daerah di serahkan ke BPPKAD, maka dibutuhkan sekali tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga Sarjana Perpajakan/ penilai pajak.

Tabel 4.5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasubbid/ Kasubbag/Sub kor	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal.

Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang terlebih dengan adanya pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerlukan sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak daerah (IT) serta perangkat IT lainnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

Secara total sarana dan prasarana BPPKAD adalah :

No	Nama Barang	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	6.650.955.489,57
2	Bahan Perpustakaan	9.872.500,00
3	Aset Tak berwujud	311.030.000,00

Ketersediaan Anggaran

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2019	22.449.453.000	APBD
2	2020	20.529.498.000	APBD
3	2021	306.116.064.547	APBD
4	2022	315.451.115.000	APBD
5	2023	316.872.862.372	APBD

Tahun Anggaran 2023 BPPKAD melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan 66 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.871.862.372 terealisasi anggaran sebesar Rp.309.838.548.646, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi Rp.22.975.728.736
- b. Belanja Pegawai Rp.17.259.393.927
- c. Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.716.334.809
- d. Belanja Hibah Rp.-
- e. Belanja Modal Rp.4.312.696.470
- f. Belanja Tidak Terduga Rp.2.366.476.700
- g. Belanja Transfer Rp. 259.574.104.540
- h. Belanja Bagi Hasil Rp. 20.609.592.200

Capaian efisiensi anggaran diperoleh dari sumber daya aparatur BPPKAD sebagai berikut :

Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat penambahan anggaran yang cukup besar, karena BPPKAD melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, pengelolaan dana darurat dan mendesak serta pengelolaan dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota. Berdasarkan sumber daya di atas berikut tabel efisiensi penggunaan sumberdaya pada BPPKAD Kabupaten Kudus.

Penggunaan sumberdaya anggaran untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp.309.838.548.646 dari total pagu anggaran sebesar Rp.316.872.862.372. Hal ini berarti ada efisiensi anggaran sebesar Rp.7.034.313.726 (2,22%).Penyerapan anggaran belanja tahun 2023 sebesar 97,78% dari total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 66 Sub Kegiatan, apabila dibandingkan antara indikator kinerja dan pencapaian sasaran terealisasi sebesar 425,56% dengan kategori sangat tinggi, dan ada efisiensi anggaran sebesar Rp.7.034.313.726. (2,22%). Penyerapan anggaran belanja tahun 2023 sebesar 97,78% menunjukkan dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran BPPKAD tahun 2023 telah tercapai.

Untuk mencapai target indikator SAKIP yang tinggi, BPPKAD perlu melakukan :

- 1) Penguatan akuntabilitas melalui keterlibatan langsung setiap pimpinan unit kerja dalam penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan peningkatan capaian kinerja.
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat hasil evaluasi SAKIP BPPKAD Tahun 2022 yaitu :
 - a. Menyusun pohon masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan secara komprehensif (lintas bidang dan lintas Perangkat Daerah) berbasis data yang memadai.
 - b. Menyusun pohon kinerja mendasar atas pohon masalah sebagaimana poin a.
 - c. Menyusun perubahan Renja mendasar atas pohon masalah dan pohon kinerja sebagaimana poin a dan b.
 - d. Menyusun pedoman teknis terkait pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta definisi operasional indikator kinerja program dan kegiatan
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja
 - f. Memastikan kesesuaian penilaian kedisiplinan dan prestasi kerja/capaian kinerja individu sebagai komponen pemberian reward and punishment dengan menghubungkan antara kontribusi kinerja individu dengan kinerja Perangkat Daerah
 - g. Melakukan penyesuaian rencana aksi kinerja berdasarkan rekomendasi hasil pemantauan dan pengendalian secara berkala atas kinerja yang tidak sesuai dengan target untuk disepakati Bersama oleh pemberi rekomendasi dan penerima rekomendasi melalui dialog kinerja.
 - h. Laporan kinerja agar dilakukan revidi oleh penanggungjawab kegiatan dan program.
 - i. Informasi dalam laporan kinerja untuk digunakan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, diantaranya digunakan untuk membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan realisasi kinerja di level nasional.
 - j. Informasi dalam laporan kinerja untuk menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja. Perhitungan efisiensi agar diintegrasikan dengan capaian kinerja.
 - k. Meningkatkan kompetensi anggota tim evaluasi implementasi SAKIP melalui diklat/bimtek/workshop mengenai SAKIP.
 - l. Memastikan konsistensi kedalaman dan penajaman catatan serta rekomendasi yang tertera dalam laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP melalui optimalisasi revidi berjenjang dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi serta pemanfaatannya sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

Tabel 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	17,04%	22,22%	130,39%	<ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,20% menjadi 22,22% pada tahun 2023. Meskipun pendapatan transfer naik sebesar 6,89%, kenaikan ini jauh dibawah kenaikan PAD sebesar 19,91% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan PAD disumbang oleh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD kecuali pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. - Kenaikan PAD yang antara lain disumbang pertumbuhan ekonomi local, intensifikasi pemungutan, dan penghapusan rujukan berjenjang pada RSUD. - Kenaikan pendapatan transfer disumbang dari semua pendapatan transfer kecuali Dana Insentif Daerah dan Dana Desa - Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun karena penurunan nilai hibah air minum dari Pemerintah Pusat 	<p>Dalam menjaga kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan, beberapa Langkah yang selalu dilakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan serta adopsi teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui pemanfaatan teknologi Informasi. - Peningkatan kapasitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia dan sarana prasarana. - Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi lain dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah
2	Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD per tahun	3,29%	19,91%	605,16%	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disumbang hampir semua jenis pendapatan kecuali hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan 9,63%, retribusi daerah 16,73%, lain-lain PAD yang sah 29,69%. 	<p>Pertumbuhan PAD yang berkesinambungan menjaditarget dalam optimalisasi pendapatan daerah. Untuk itu Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui pemanfaatan

						<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah antara lain disumbang : pertumbuhan ekonomi local, intensifikasi pemungutan dan penghapusan rujukan berjenjang pada RSUD. - Penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan bagi hasil asset management unit (AMU) yang dibagikan tahun 2022. Selain itu proporsi saham pada Bank Jateng juga berpotensi mengurangi nilai pendapatan pada sektor ini 	<p>teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas sumberdaya, baik sumberdaya manusia dan sarana prasarana - Penambahan penyertaan modal pada Bank Jateng sesuai komitmen yang telah disepakati - Pembinaan BUMD agar lebih efisien dan efektif dalam melayani Masyarakat dan memberikan kontribusi pada PAD.
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	93,70%			<ul style="list-style-type: none"> - Ada regulasi/Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan nilai WTP sejak 2012 s/d 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi - Koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam penyelesaian LKPD.
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	80,40 nilai			<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dari pengelola kegiatan dalam penyelesaian pelaksanaan program kegiatan 	<p>Melakukan koordinasi rekonsiliasi, verifikasi dengan pengelola kegiatan secara rutin</p>

6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, berikut tabel program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan :

Tabel 6.1
Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (BPPKAD)	83,57 Indeks	88,39 Indeks	105,86%	Meningkatkan kualitas layanan kepada OPD dan masyarakat/Wajib Pajak (WP)	Inovasi pelayanan yang cepat dan mudah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dok	15 Dok	100%	Komitmen kinerja dari semua unsur pelaksana	Komunikasi, koordinasi dan evaluasi yang intensif dengan Bidang-Bidang
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan	8 Dok	8 Dok	100%	Regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi agar tepat waktu, tertib, cepat dalam pelaksanaan administrasi keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	4 Orang	66,67%	Diklat menyesuaikan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Seleksi pemilihan Diklat yang sesuai kebutuhan organisasi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 Dok	57 Dok	100%	Komitmen kinerja dari semua unsur pelaksana	Koordinasi dengan Bidang-Bidang
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan mebel, perlengkapan dan peralatan kantor	19 Unit	19 Unit	152,63%	Ada beberapa barang yang spesifikasinya sudah discontinue	Perubahan rincian DPA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	17 Orang	17 Orang	100%	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	184 Unit	110 Unit	59,78%	Keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Membuat buku penjagaan jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	
		Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95 persen	86,17 persen	90,71%	Belanja modal penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (SIHT) pembangunan Sarana Distribusi	Mempedomani regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan

						Perdangangan tidak terealisasi	
		Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Daerah	8 Dok	8 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat /Pemerintah Provinsi
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi belanja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Sosialisasi Regulasi pengelolaan keuangan daerah kepada OPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan tahapan penyusunan LKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan daerah	12 Dok	12 Dok	100%	Regulasi/peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Keuangan daerah	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pada OPD pengelola Dana Bantuan Keuangan
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	95 persen	99,94 persen	105,2%		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD	14 Dok	14 Dok	100%	Belum oprimalnya penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD	Rekonsiliasi Aset/BMD secara berkala dengan OPD
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase realisasi PAD	100 persen	102,67 persen	102,67%		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi PAD	374 Milliar	416,45 Miliar	111,35%	- Kenaikan tersebut diantaranya karena Optimalisasi PAD, penyesuaian nilai jual obyek pajak, pemantauan transaksi pajak melalui digitalisasi elektronik di potensi-potensi pendapatan	- Membangun dan mengembangkan sistem/aplikasi based data pendapatan dan keuangan - Menyusun kajian potensi pendapatan daerah - Memperkuat dasar hukum pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, diantaranya

							<p>penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, melakukan pemasangan tapping box yang ditempatkan di cash register di Hotel/ Restoran yang relatif besar.</p> <p>- Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah/ retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

B. REALISASI ANGGARAN

BPPKAD melaksanakan tugas pokok dan fungsi unsur penunjang bidang keuangan, dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati, untuk mewujudkan pemerintahan yang handal untuk peningkatan pelayanan publik didukung anggaran sebesar Rp.316.872.862.372 yang digunakan untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Berikut anggaran dan realisasi belanja BPPKAD tahun 2023.

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023**

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIENSI	% CAPAIAN EFISIENSI
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.875.496.850	18.488.229.759	88,56	2.387.267.091	11,44
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>19.035.850</i>	<i>17.741.280</i>	<i>93,20</i>	<i>1.294.570</i>	<i>6,80</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.476.275	10.128.280	96,68	347.995	3,32
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.559.575	7.613.000	88,94	946.575	11,06
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>19.456.266.500</i>	<i>17.222.854.627</i>	<i>88,52</i>	<i>2.233.411.873</i>	<i>11,48</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.804.000	17.095.763.927	88,46	2.231.040.073	11,54
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.257.500	123.534.000	98,62	1.723.500	1,38
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.205.000	3.556.700	84,58	648.300	15,42
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>117.866.300</i>	<i>94.579.400</i>	<i>80,24</i>	<i>23.286.900</i>	<i>19,76</i>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	117.866.300	94.579.400	80,24	23.286.900	19,76
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>308.681.450</i>	<i>252.990.648</i>	<i>81,96</i>	<i>55.690.802</i>	<i>18,04</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.617.000	2.607.500	99,64	9.500	0,36
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.023.000	35.836.900	60,72	23.186.100	39,28
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.072.000	5.614.000	69,55	2.458.000	30,45
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.209.250	29.611.190	75,52	9.598.060	24,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.644.200	16.110.500	78,04	4.533.700	21,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.608.000	3.790.000	82,25	818.000	17,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.508.000	159.420.558	91,35	15.087.442	8,65
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>75.256.000</i>	<i>70.946.000</i>	<i>94,27</i>	<i>4.310.000</i>	<i>5,73</i>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.256.000	70.946.000	94,27	4.310.000	5,73

<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	612.097.250	588.768.925	96,19	23.328.325	3,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.090.000	6.847.850	75,33	2.242.150	24,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.747.000	23.665.587	76,97	7.081.413	23,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.260.250	558.255.488	97,55	14.004.762	2,45
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	286.293.500	240.348.879	83,95	45.944.621	16,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.764.500	196.368.879	88,55	25.395.621	11,45
Pemeliharaan Mebel	1.752.000	712.500	40,67	1.039.500	59,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.601.000	12.158.500	62,03	7.442.500	37,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.176.000	31.109.000	72,05	12.067.000	27,95
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	287.340.987.313	284.195.201.415	98,91	3.145.785.898	1,09
<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	961.392.340	844.704.836	87,86	116.687.504	12,14
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	288.040.640	264.374.000	91,78	23.666.640	8,22
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	164.549.220	118.144.000	71,80	46.405.220	28,20
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	316.508.640	298.918.100	94,44	17.590.540	5,56
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	192.293.840	163.268.736	84,91	29.025.104	15,09
<i>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	315.023.850	304.874.139	96,78	10.149.711	3,22
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	140.696.000	138.985.700	98,78	1.710.300	1,22
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	73.265.000	72.527.940	98,99	737.060	1,01

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.943.000	18.875.000	90,13	2.068.000	9,87
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	80.119.850	74.485.499	92,97	5.634.351	7,03
<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	<i>591.106.500</i>	<i>495.449.000</i>	<i>83,82</i>	<i>95.657.500</i>	<i>16,18</i>
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	62.670.000	54.622.000	87,16	8.048.000	12,84
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	251.679.500	236.257.500	93,87	15.422.000	6,13
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	264.325.000	204.569.500	77,39	59.755.500	22,61
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.766.000	0	0,00	5.766.000	100,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	6.666.000	0	0,00	6.666.000	100,00
<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>285.473.464.623</i>	<i>282.550.173.440</i>	<i>98,98</i>	<i>2.923.291.183</i>	<i>1,02</i>
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	259.625.882.000	259.574.104.540	99,98	51.777.460	0,02
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.233.453.623	2.366.476.700	45,22	2.866.976.923	54,78
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	20.614.129.000	20.609.592.200	99,98	4.536.800	0,02
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.768.711.714	5.385.365.757	79,56	1.383.345.957	20,44
<i>Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>6.768.711.714</i>	<i>5.385.365.757</i>	<i>79,56</i>	<i>1.383.345.957</i>	<i>20,44</i>
Penyusunan Standar Harga	271.465.211	245.529.875	90,45	25.935.336	9,55
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	124.198.809	102.679.900	82,67	21.518.909	17,33

	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.247.100	252.200	20,22	994.900	79,78
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.294	75.047.332	75,05	24.952.962	24,95
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.811.216.450	706.298.480	39,00	1.104.917.970	61,00
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12.706.750	7.987.400	62,86	4.719.350	37,14
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4.447.877.100	4.247.570.570	95,50	200.306.530	4,50
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.887.666.495	1.769.751.715	93,75	117.914.780	6,25
	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>1.887.666.495</i>	<i>1.769.751.715</i>	<i>93,75</i>	<i>117.914.780</i>	<i>6,25</i>
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	25.806.560	20.226.700	78,38	5.579.860	21,62
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	163.105.940	152.523.721	93,51	10.582.219	6,49
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	96.523.265	83.396.000	86,40	13.127.265	13,60
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	13.277.600	13.277.600	100,00	0	0,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	27.460.000	21.278.000	77,49	6.182.000	22,51
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60.000.000	58.747.000	97,91	1.253.000	2,09
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.442.850	5.328.500	51,03	5.114.350	48,97
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	150.272.000	142.520.200	94,84	7.751.800	5,16
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	38.447.000	28.065.000	73,00	10.382.000	27,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	6.000.000	3.250.000	54,17	2.750.000	45,83
	Penagihan Pajak Daerah	805.989.000	796.030.430	98,76	9.958.570	1,24
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.196.000	6.745.000	73,35	2.451.000	26,65
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	444.408.000	413.862.842	93,13	30.545.158	6,87
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.804.640	2.293.500	81,78	511.140	18,22
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	33.933.640	22.207.222	65,44	11.726.418	34,56
	TOTAL	316.872.862.372	309.838.548.646	97,78	7.034.313.726	2,22

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pencapaian Kinerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran adalah sebesar Rp.309.838.548.646 dari total pagu anggaran sebesar Rp.316.872.862.372. Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan baik mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai pencapaian target output kegiatan sesuai yang ditargetkan.

Berdasarkan tabel realisasi anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan BPPKAD Tahun Anggaran 2023 diketahui terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.034.313.726. (2,22%). Penyerapan anggaran belanja Tahun 2023 sebesar 97,78% dari total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Efisiensi tersebut dihasilkan melalui :

1. Efisiensi harga pengadaan barang dan jasa di sekretariat dan di Bidang-Bidang
2. Sisa anggaran TPP dan gaji
3. Efektifitas penggunaan sumberdaya yang ada.

**REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisienai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.476.275	10.128.280	Perencana Ahli Muda	96,81 %	3,32 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9,00		100,00 %	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.559.575	7.613.000	Perencana Ahli Muda	88,94 %	11,06 %
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.326.804.000	17.095.783.927	Kepala Sub Bagian Keuangan	88,46 %	3,54 %
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		69,00		92,00 %	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			125.257.500	123.534.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	98,62 %	1,38 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok		1,00		100,00 %	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			4.205.000	3.556.700	Kepala Sub Bagian Keuangan	84,58 %	15,42 %
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok		8,00		100,00 %	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			117.868.300	84.579.400	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	80,24 %	19,76 %
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang		100,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.617.000	2.607.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	99,64 %	0,36 %
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.023.000	35.838.900	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	60,72 %	39,28 %
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	83 Paket		83,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.072.000	5.614.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	69,55 %	30,45 %
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket		33,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.209.250	29.611.190	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	75,52 %	24,48 %
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket		14,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.644.200	16.110.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	78,04 %	21,96 %
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket		17,00		100,00 %	

No_Rokening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.608.000	3.790.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	82,25 %	17,75 %
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dak		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.508.000	159.420.558	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	91,36 %	8,65 %
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap		30,00		100,00 %	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.256.000	70.946.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	94,27 %	5,73 %
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.080.000	6.847.850	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	75,33 %	24,87 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.747.000	23.665.587	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	76,97 %	23,03 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Lap		2,00		100,00 %	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			572.260.250	558.255.488	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	97,56 %	2,45 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap		12,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			221.764.500	196.368.878	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	88,55 %	9,91 %
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		128,00		98,46 %	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			1.752.000	712.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	40,66 %	22,97 %
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit		7,00		63,64 %	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.601.000	12.158.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	62,03 %	37,97 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10,00		100,00 %	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			43.176.000	31.108.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	72,05 %	27,95 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit		27,00		100,00 %	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			288.040.640	264.374.000	Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya	91,79 %	8,22 %
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			164.549.220	118.144.000	Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya	71,80 %	28,20 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			316.508.640	288.918.100	Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	91,34 %	5,56 %
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			192.293.840	163.268.736	Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	84,91 %	15,09 %
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			140.698.000	138.985.700	Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah	98,86 %	1,22 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen		4,00		100,00 %	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			73.265.000	72.527.940	Kasubbid Belanja Langsung	98,99 %	-0,24 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	80 Dokumen		79,00		98,75 %	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			20.943.000	18.875.000	Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah	90,13 %	6,80 %
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Penerimaan dan Pengeluaran	8954 Laporan		6.740,00		75,17 %	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			80.119.850	74.485.499	Kasubbid Belanja Langsung	92,97 %	7,03 %
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen		25,00		100,00 %	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			62.670.000	54.622.000	Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan Sumber Daya Alam	87,16 %	12,84 %
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18,00		100,00 %	

No_Rakening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			251.679.500	236.257.500	Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan Sumber Daya Alam	93,87 %	6,13 %
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1,00		100,00 %	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			264.325.000	204.569.500	Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya	77,39 %	22,61 %
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3,00		100,00 %	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			5.766.000	0	Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya	0,00 %	50,00 %
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0,50		50,00 %	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			6.666.000	0	Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya	0,00 %	50,00 %
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		0,50		50,00 %	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			259.626.882.000	259.574.104.540	Kasubbid Belanja Langsung	99,98 %	0,02 %
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan		12,00		100,00 %	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			5.233.453.623	2.366.476.700	Kasubbid Belanja Langsung	45,23 %	54,78 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		12,00		100,00 %	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			20.614.129.000	20.609.582.200	Kasubbid Belanja Langsung	99,95 %	0,02 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			271.465.211	245.529.875	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	90,45 %	9,55 %
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			124.198.809	102.679.900	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	82,87 %	17,33 %
		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.247.100	252.200	Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset	20,22 %	79,78 %

No_Rakening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			100.000.294	75.047.332	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah	75,05 %	24,95 %
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan		6,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.811.216.450	706.298.480	Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset	39,00 %	61,00 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	900 Serifikat		904,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			12.706.750	7.987.400	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah	62,88 %	37,14 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1,00		100,00 %	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			4.447.877.100	4.247.570.570	Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset	95,50 %	4,50 %
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	11 Dokumen		11,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			25.808.560	20.228.700	Kasubbid Perencanaan dan Penetapan	78,38 %	21,82 %
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		2,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			163.105.940	152.523.721	Kasubbid Perencanaan dan Penetapan	93,51 %	6,49 %
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			98.523.265	83.398.000	KEPALA UPTD PENGELOLA PAJAK DAERAH	84,64 %	13,80 %
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			13.277.600	13.277.600	KEPALA UPTD PENGELOLA PAJAK DAERAH	100,00 %	0,00 %
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			27.480.000	21.278.000	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (SUBKOR)	77,49 %	16,49 %
		Jumlah Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	15000 OP/WP		14.097,00		93,95 %	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			60.000.000	58.747.000	Kasubbid Pengalihan dan Keberatan	97,91 %	2,09 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah			10.442.850	5.328.500	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	51,03 %	48,97 %

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Bangunan (BPHTB)					AHLI MUDA (SUBKOR)		
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	16 Obyek Pajak		16,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			150.272.000	142.520.200	Kasubbid Perencanaan dan Penetapan	94,84 %	5,16 %
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	399000 Dokumen		399.000,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			38.447.000	28.065.000	KEPALA UPTD PENGELOLA PAJAK DAERAH	73,00 %	27,00 %
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22500 Layanan		27.459,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000.000	3.250.000	KEPALA UPTD PENGELOLA PAJAK DAERAH	54,17 %	45,83 %
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			805.988.000	796.030.430	Kasubbid Penagihan dan Keberatan	98,76 %	1,24 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			9.198.000	6.785.000	Kasubbid Penagihan dan Keberatan	73,89 %	26,11 %
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Dokumen		115,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			444.408.000	413.862.842	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (SUBKOR)	93,13 %	6,87 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.804.640	2.293.500	Kasubbid Perencanaan dan Penetapan	81,78 %	18,22 %
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan		1,00		100,00 %	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			33.933.640	22.207.222	Kasubbid Perencanaan dan Penetapan	65,44 %	34,56 %
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1,00		100,00 %	

BAB IV PENUTUP

A.KESIMPULAN

Keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugasnya pada Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel realisasi kinerja serta capaian kinerja sbb : Berdasarkan skala penilaian capaian kinerja semua target sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan target 17,04% dengan realisasi 22,22% dengan persentase capaian 130,39% sehingga capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
2. Meningkatnya PAD target 3,29% realisasi 19,91% persentase capaian 605,16% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah target 93,70% realisasi 96,52% persentase capaian 103,11% capaian kinerja berkriteria sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPKAD dengan target nilai SAKIP 80,40, realisasi dalam proses evaluasi Inspektorat.

B.REKOMENDASI

Rekomendasi LKJIP Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 telah ditindaklanjuti , walaupun masih perlu upaya perbaikan kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024. Rekomendasi perbaikan kinerja Tahun 2023 yang perlu diupayakan apada Tahun 2024 antara lain :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi/Digitalisasi.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui optimalisasi pelayanan kepada perangkat daerah, masyarakat, wajib pajak/wajib retribusi
3. Optimalisasi implementasi SAKIP hasil evaluasi serta pemanfaatannya sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan
4. Peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dikeluarkan oleh Kemendagri.
5. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergitas dalam mencapai tujuan organisasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun pencapaian kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus selalu diupayakan untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun berikutnya. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 BPPKAD Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS



DJATI SOECHAH, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 198803 2 009